

**RENCANA KERJA
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI POLDA KALBAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. Latar Belakang

1. Kondisi Umum

Tahun 2025 merupakan tahun awal dari Tahapan Rencana Strategis Polri 2025-2029 dan sebagai kelanjutan dari Rencana Kerja Polri T.A. 2024, sehingga perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Polri T.A. 2025. Rencana Kerja Polri T.A. 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Polri 2025-2029.

Rencana Kerja Polri T.A. 2025 disusun dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan tahun 2025 yaitu pemantapan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, yang terdiri dari peningkatan kesejahteraan dan kualitas, percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi dan reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kinerja perangkat daerah dan penegakan hukum

Salah satu satker pada Polri yaitu Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi bertugas untuk memberikan bimbingan teknis dalam rangka Penyelenggaraan dan merealisasikan program Komunikasi dan Informasi Kepolisian untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan penyempurnaan dan pembaharuan terhadap perkembangan teknologi sesuai dengan perkembangan jaman sekarang pengawasan dan pengendalian Alkomlek agar tercapai efektifitas dan efesiensi serta produktifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri khususnya Polda Kalbar.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang ***Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah***, sebagai pengganti dari Keputusan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 , Bidang TIK Polda Kalbar dipimpin oleh Kabid TIK Polda Kalbar yang

bertugas

bertugas memimpin dan melaksanakan fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi seluruh jajaran Polda Kalbar serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda Kalbar.

Kabid TIK Polda Kalbar sebagaimana dimaksud diatas, merupakan unsur pimpinan pada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Kalbar yang berkedudukan dibawah Kapolda dan bertanggung jawab kepada Kapolda Kalbar serta dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolda Kalbar. Dalam perkembangan dan pelaksanaan serta pengendalian khususnya di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kabid TIK dibantu oleh :

a. Subbag Perencana dan Administrasi (Subbagrenmin)

Subbagrenmin dipimpin oleh Kasubbagrenmin yang bertugas menyusun Perencanaan Program kerja dan anggaran, manajemen sarana dan prasarana, Personel, mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan serta urusan dalam dilingkungan Bidang TIK. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi :

- 1) menyusun perencanaan jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, rancangan renja, renja, kebutuhan sarpras , personel, dan anggaran;
- 2) pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
- 3) pengelolaan sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
- 4) pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan , pengendalian pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
- 5) pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam;
- 6) penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja satker dalam bentuk LKIP meliputi analisis terget pencapaian kinerja, program, dan anggaran; dan
- 7) Kasubbagrenmin bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kabid TIK Polda Kalbar.

Dalam Pelaksanaan tugas, Kasubbagrenmin dibantu oleh :

- a) Kepala Urusan Perencanaan (Kaurren);
- b) Kepala Urusan Administrasi (Kaurmintu);
- c) Kepala Urusan Keuangan (Kaurkeu);
- d) Perwira Admininstrasi (Pamin); dan
- e) Bantuan Umum (Banum).

b. Bidang Teknologi dan Komunikasi (Bid Tekkom)

Bid Tekkom dipimpin oleh Kasubbid Tekkom yang bertugas :

- 1) Membantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Kabid TIK Polda Kalbar, memberikan arahan dalam hal perumusan dan pengembangan sistem dan metoda, pengkoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan pembinaan fungsi Teknologi Komunikasi dan Informasi Kepolisian sesuai batas kewenangan yang ada padanya;
- 2) Pembinaan sistem dan teknologi informasi di lingkungan polda;
- 3) Pemeliharaan dan perbaikan Alat Komunikasi (Harakan ALkom) data dan jaringan;
- 4) Pembangunan dan pengembangan jaringan yang mencakup intranet dan internet, serta pengelolaan domain polda;
- 5) Pelayanan dukungan teknis di bidang sistem dan teknologi informasi kepada jajaran polda; dan
- 6) Memberikan saran dan masukan kepada Kabid TIK mengenai hal-hal yang berhubungan dengan teknologi dan informasi.

Dalam Pelaksanaan tugas, Kasubbid Tekkom dibantu oleh :

- a) Kepala Urusan Jaringan Komunikasi (Kaur Jarkom);
- b) Kepala Urusan Pelayanan Komunikasi (Kaur Yankom);
- c) Kepala Urusan Pemeliharaan dan Perbaikan (Kaur Harkan);
- d) Perwira Urusan Jaringan Komunikasi (Paur Jarkom);
- e) Perwira Urusan Pelayanan Komunikasi (Paur Yankom);

- f) Perwira Urusan Pemeliharaan dan Perbaikan (Paur Harkan); dan
- g) Bantuan Umum (Banum).

c. Bidang Teknologi Informasi (Bid Tekinfo)

Bid Tekinfo dipimpin oleh Kasubbid Tekinfo yang bertugas :

- 1) membantu urusan sarana prasarana, pengumpulan dan pengolahan data, membantu urusan penyajian Informasi dan dokumentasi bidang operasional maupun pembinaan di lingkungan Polda membantu urusan menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan perangkat lunak komputer serta pelayanan multimedia yang sesuai dengan batas kewenangannya;
- 2) memimpin semua kegiatan yang berkaitan dengan informasi, pengolahan dan pengumpulan data dan pelayanan multimedia;
- 3) bekerjasama dengan pegemban tugas fungsi administrasi pada satuan lain secara vertikal maupun horizontal;
- 4) pembinaan dan pengembangan hardware dan software komputer serta pelayanan multimedia;
- 5) melaporkan hasil kegiatan perencanaan dan administrasi komunikasi dan elektronika kepada Kabid TIK Polda Kalbar; dan
- 6) memberikan saran dan masukan kepada kabid TIK mengenai hal-hal yang berhubungan dengan informasi, pengolahan dan penyajian data.

Dalam Pelaksanaan tugas, Kasubbid Tekinfo dibantu oleh :

- a. Kepala Urusan Pengumpulan dan Pengolahan Data (Kaur Pullahta);
- b. Kepala Urusan Infrastruktur Teknologi Informasi (Kaur Inti);
- c. Kepala Urusan Pelayanan DukunganTeknis (Kaur Yanduknis);
- d. Perwira Urusan Pengumpulan dan Pengolahan Data (Paur Pullahta);
- e. Perwira Urusan Infrastruktur Teknologi Informasi (Paur Inti);
- f. Perwira Urusan Pelayanan DukunganTeknis (Paur Yanduknis); dan
- g. Bantuan Umum (Banum).

2. Analisis SWOT

Rencana Kerja Bidang TIK Polda Kalbar T.A 2025 merupakan penjabaran Dari kebijakan Kapolda Kalbar yang diarahkan untuk meningkatkan Kinerja Bidang TIK Polda Kalbar tahun 2025 dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman(***Strenghts, Weaknesses, Opportunities dan Threats (SWOT)***).

Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Bidang TIK Polda Kalbar T.A 2025 dikaitkan dengan perkembangan, perubahan lingkungan Strategis, Kondisi dan Tupoksi pada Bidang TIK Polda Kalbar perlu dilakukan analisa SWOT sebagai berikut :

a. Kekuatan

- 1) Bidang TIK Polda Kalbar pada bulan Juni 2024 sebanyak 46 orang, dan sebagian SDM telah memiliki kompetensi teknis;
- 2) Bidang TIK Polda Kalbar memiliki Sarpras yang memadai dengan spesifikasi teknis berteknologi standar internasional;
- 3) Adanya *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan penyedia layanan jasa telekomunikasi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi;
- 4) Dukungan Anggaran sudah mengakomodir operasional tugas Bid TIK;
- 5) Tersedianya SOP penggunaan Alkom dan pelayanan Bid TIK.

b. Kelemahan

- 1) kuantitas personel pengemban tugas fungsi teknologi informasi dan komunikasi dengan jenjang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan seperti strata 1 teknik informatika dan elektronika jumlahnya belum memenuhi
- 2) standar kebutuhan dan umumnya personel TIK tidak memiliki dasar pengetahuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan bertugas sebagai staf administrasi;

3) masih...

- 3) masih terbatasnya Ranmor inventaris Bid TIK yang bisa digunakan untuk menuju daerah yang geografisnya sulit dijangkau dengan ranmor biasa;
- 4) masih terbatasnya Alkom dan Almon Bidang TIK yang dimiliki sehingga tidak bisa memaksimalkan perbaikan dan monitoring;

c. Peluang

- 1) penggelaran jumlah site repeater dan sistem komunikasi radio sudah sesuai dengan luas dan kondisi geografis satuan kewilayahan;
- 2) Alkom pada Satker Mapolda Kalbar berupa Alkom SISPAMKOTA;
- 3) dalam kecepatan bertindak unit-unit polri yang bergerak di lapangan harus segera di dukung oleh sistem komunikasi data nirkabel guna dapat mengakses data yang diperlukan dan tersimpan di pusat data;

d. Ancaman

- 1) secara geografis wilayah Kalbar mayoritas merupakan daerah datar sehingga di khawatirkan adanya propagasi frekuensi yang mengakibatkan terjadinya hambatan sehingga menghambat dalam penggelaran membangun Lynksystem;
- 2) Pengguna Frekwensi dan alat komunikasi yang tidak sesuai dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan sehingga pendataan spktrum frekwensi radio sebagai sumber data tidak akurat;
- 3) Terjadinya interfrensi/ saling ganggu yang disebabkan terjadinya pelanggaran penggunaan frekwensi yang mengakibatkan dan ancaman keselamatan jiwa manusia.

3. Identifikasi Masalah

a. Bidang Sumber Daya Manusia

- 1) Kuantitas personel pengemban tugas fungsi teknologi Informasi dan Komunikasi dengan jenjang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan seperti strata 1 teknik informatika dan elektronika jumlahnya belum memenuhi

standar kebutuhan dan umumnya personel TIK tidak memiliki dasar pengetahuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan bertugas sebagai staf administrasi;

- 2) kemampuan personel di bidang komunikasi radio masih sebatas sebagai operator;
- 3) personel baik polri maupun pns yang ditempatkan di TIK tidak memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, khususnya satker kewilayahan si TIK polres;
- 4) perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mengarah kepada teknologi berbasis ip (internet protokol) namun demikian hanya sebagian kecil personel ti hanya sebatas tingkat polda yang mempunyai kemampuan/kualifikasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi data berbasis ip;
- 5) personel pengemban fungsi TIK belum memiliki kualifikasi di bidang pengamanan jaringan (**security network**); dan
- 6) kegiatan kajian dan riset di bidang TIK khususnya komplek sampai saat ini belum pernah dilaksanakan.

b. Bidang Sarana dan Prasarana

1) Sistem Komunikasi Radio :

- a) jumlah repeater belum memenuhi coverage area suatu wilayah dan jangkauan repeater relatif pendek karena menggunakan frekuensi 800 mhz;pembangunan yang tidak konsisten dan sistem yang digunakan sering berubah-ubah;
- b) suku cadang tidak tersedia di indonesia sehingga pengadaan suku cadang terkendala;
- c) sistem link cenderung menggunakan vpn-ip yang disediakan oleh pihak ke tiga dengan biaya tinggi;

d)campur ...

- d) campur tangan pihak ke tiga sangat kental dengan pemilihan sistem dan peralatan radio polri; dan
- e) pembangunan tidak disertai dengan pembangunan tower terjadi kendala dalam penempatan repeater.

2) **Sistem Komunikasi Data :**

- a) sudah tergelar jaringan komunikasi data vpn-ip hingga satuan polres dan polsek-polsek belum memiliki sistem komunikasi data;
- b) sudah tergelar jaringan internet namun sebatas satuan polres dan polsek-polsek pada umumnya belum tergelar;
- c) infrastruktur komunikasi data dan video (jaringan multimedia) sudah tergelar hingga satuan polres;
- d) layanan polri call center 110 sudah terbangun pada satuan polres namun belum ke seluruh polres terbangun; dan
- e) Tergelarnya perangkat Comrad Center (CC) Polda Kalbar dan Polres Jajaran sebagai fasilitas pendukung Harkamtibmas.

II. Tujuan dan Sasaran

a. Visi dan Misi Polda Kalbar

a. Visi

“Terwujudnya Kalimantan Barat Emas yang Aman dan Tertib”

b. Misi

Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat Kalimantan Barat.

b. Visi dan Misi Bidang TIK Polda Kalbar

a. Visi

Terwujudnya pembinaan teknologi informasi dan komunikasi, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi Kamtibmas dan pelayanan multimedia

b. Misi

- 1) Melaksanakan pembangunan system dan metode, materil, dan fasilitas yang berbasis dengan teknologi komunikasi dan informasi untuk mendukung tugas operasional;
- 2) Meningkatkan etika profesi, gairah kerja dan disiplin dengan menerapkan system reward and punishment;
- 3) Meningkatkan kemampuan personel dengan mengikut sertakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan komunikasi dan irformatika;
- 4) Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mengembangkan jaringan komunikasi dan informasi, baik secara verikal maupun horizontal.

c. Tujuan jangka menengah

a. Polda Kalbar

Adapun tema pembangunan Polda Kalbar adalah “**Polda Kalbar yang Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”.

b. Bidang TIK Polda Kalbar

Tujuan jangka menengah Bidang TIK Polda Kalbar adalah modernisasi pelayanan Polri, yaitu:

- a. Menguasai Teknologi dan Informatika dan mengimplementasikan dalam tugas Polri di lapangan;
- b. Meningkatkan kemampuan personil di Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika dalam rangka peningkatan pelayanan pengguna alat komunikasi dan data;
- c. Memperluas jaringan komunikasi hingga ke Polsek - Polsek dalam rangka Komando kendali dan informasi;
- d. Mewujudkan Polda sebagai Pusat Komunikasi, Komando, Kendali dan Informasi;
- e. Membangun system informasi, pengelolaan serta penyajian data yang mampu mendukung kebutuhan pengguna;
- f. Membangun jaringan komunikasi perbatasan dalam rangka mendukung patroli pengamanan perbatasan Indonesia dan Malaysia;
- g. Mengimplementasikan system manajemen Kepolisian yang profesional melalui antara lain :
 - 1) Manajemen administrasi, keuangan dan anggaran yang akuntable, transparan,efisien, dan lancar;
 - 2) Manajemen sumber daya manusia yang mahir, terpuji dan patuh hukum; dan
 - 3) Meningkatkan kemampuan dan mutu pelayanan di semua tingkat satuan dan fungsi.

d. Sasaran Prioritas

a. Polda Kalbar

Sasaran Prioritas Polda Kalbar tahun 2025 mengacu kepada Sasaran Prioritas Kapolri, yaitu sebagai berikut:

- 1) **pertama** “Mewujudkan Sinergitas Polisi, Masyarakat dan Stakeholder dalam rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Secara Proaktif”;
- 2) **kedua** “Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Polri yang Semakin Inovatif”;
- 3) **ketiga** “Mewujudkan Penegakkan Hukum dan Pelayanan Penanganan Perkara yang Adil, Transparan, Legal, Humanis dan Setara”;
- 4) **keempat** “Mewujudkan Pengelolaan SDM yang Mandiri, Berintegritas dan Profesional”;
- 5) **kelima** “Mewujudkan Almatsus, Perbekalan dan Fasilitas Konstruksi Polri yang Modern dan Memadai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Berbasis *Minimum Essential Police Equipment (MEPE)*”;
- 6) **keenam** “Mewujudkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian”.

b. Bidang TIK Polda Kalbar

- 1) Sasaran Prioritas Bidang TIK Polda Kalbar adalah: **“Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Polri yang Semakin Inovatif”**;

III. Arah Kebijakan dan strategi Tahun 2025

III. Arah

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kalbar Tahun 2025

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polda Kalbar Tahun 2025, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi Polda Kalbar sebagai berikut:

a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Mewujudkan Sinergitas Polisi, Masyarakat dan Stakeholder dalam rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Secara Proaktif”**, yaitu:

1) melaksanakan deteksi aksi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) analisis keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 3112);
- b) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik (prog.Harkamtibmas Giat 3114);
- c) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi (prog.Harkamtibmas/Giat 3115);
- d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya (prog.Harkamtibmas/Giat 3116);
- e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara (prog.Harkamtibmas/Giat 3117);
- f) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan khusus (prog.Harkamtibmas/Giat 3150).

2) menurunkan potensi kejahatan, gangguan Kamtibmas melalui kegiatan peningkatan edukasi dan kolaborasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pembinaan potensi keamanan(prog.Harkamtibmas/Giat 5076);
a)pembinaan..

- b) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
 - c) penyelenggaraan pengamanan objek vital (prog.Harkamtibmas/Giat 3131);
 - d) penyelenggaraan kepolisian perairan (prog.Harkamtibmas/Giat 3134);
 - e) pengelolaan Multimedia (Prog.dukma/Giat 3149).
- 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan “Pemolisian Prediktif” dalam rangka menjaga Stabilitas Harkamtibmas” (*Cooling System*);
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pembinaanpotensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076);
 - b) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
 - c) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lintas (prog.Harkamtibmas/Giat 3133).
- 4) mengedepankanpenanganan konflik secara humanis;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akandilakukan:
- a) analis keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 3112);
 - b) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076);
 - c) penanggulangan keamanan dalam negeri (prog.Harkamtibmas/Giat 5087);
 - d) pelayanan psikologi Anggota Polri (prog.Harkamtibmas/ Giat 3110);
 - e) pembinaanpelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130).

- 5) mewujudkan Kamseltibcar Lantas guna memberikan rasa aman berkendara saat terjadi kemacetan dan jam rawan kejahatan;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan;
- a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
 - b) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas (prog.Harkamtibmas/Giat 3133).
- 6) meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri di lokasi rawan gempa, bencana dan *slum area*;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
 - b) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076);
 - c) penanggulangan keamanan dalam negeri (prog.Harkamtibmas/Giat 5087).
- 7) melaksanakan kegiatan pengamanan *event* nasional/ internasional selama tahun 2025;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pembinaan operasi kepolisian (prog.Harkamtibmas/Giat 5079);
 - b) penanggulangan keamanan dalam negeri (prog.Harkamtibmas/Giat 5087);
 - c) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas (prog.Harkamtibmas/Giat 3133);
 - d) penyelenggaraan pengamanan objek vital (prog.Harkamtibmas/Giat 3131);
 - e) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
 - f) penyelenggaraan..

- f) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya (prog.Harkamtibmas/Giat 3116);
- 8) meningkatkan penggelaran operasional kepolisian dan *back up* kewilayahan dalam rangka penanganan konflik sosial (agraria); pengamanan unjuk rasa; dan gangguan keamanan bersenjata; serta menjalin sinergisitas polisional;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
- b) penanggulangan keamanan dalam negeri (prog.Harkamtibmas/Giat 5087);
- c) pembinaan potensi keamanan (prog.Harkamtibmas/Giat 5076);
- d) pembinaan operasi kepolisian (prog.Harkamtibmas/Giat 5079);
- e) kerja sama keamanan danketertiban K/L (prog.Harkamtibmas/Giat 3120);
- 9) meningkatkan kerja sama kepolisian dalam/luar negeri guna mendukung Stabilitas Kamtibmas;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- kerja sama keamanan dan ketertiban K/L (prog.Harkamtibmas/Giat 3120);
- 10) meningkatkan kegiatan *surveillance* patroli kapal dan pesawat udara Polridi wilayah perbatasan guna mendukung terlaksananya pengamanan laut/pesisir;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- penyelenggaraan kepolisian perairan (prog. Harkamtibmas/Giat 3134);

- 11) meningkatkan kehadiran anggota Polri di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan
 - a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog. Harkamtibmas/Giat 3130);
 - b) penyelenggaraan kepolisian perairan (prog. Harkamtibmas/Giat 3134).
- b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Polri yang Semakin Inovatif”**, yaitu:
 - 1) melaksanakan kegiatan “JUMAT CURHAT dan MINGGU KASIH” sebagai sarana untuk menerima kritik, masukan maupun aduan publik.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
pembinaan potensi keamanan (Prog. Harkamtibmas/Giat 5076);
 - 2) melaksanakan modernisasi fasilitas sarana dan prasarana pada sentra pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pengembangan peralatan Polri (Prog. modernisasi almatsus dan sarpras Polri/Giat 3084);
 - b) teknologi komunikasi (Prog. dukma/Giat 5055);
 - c) penyelenggaraan teknologi informasi (Prog. dukma/Giat 3071).
 - 3) meningkatkan dan menjaga profesionalisme anggota Polri dalam melayani masyarakat guna meniadakan segala pungutan liar pada pelayanan publik;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) Penyelenggaraan..

- a) penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri (Prog.SDM/Giat 3100);
 - b) pembinaan potensikeamanan (Prog. Harkamtibmas/Giat 5076);
 - c) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas (Prog. Harkamtibmas/Giat 3133);
 - d) dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Prog. Harkamtibmas/Giat 3128).
- 4) mengoptimalkan ruang SPKT dan RPK yang *online* dan humanis serta berbasis TIK;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) penindakan tindak pidana umum (Prog.lidiksidik/Giat 3142);
 - b) penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri (Prog.SDM/Giat 3100);
- 5) meningkatkan *quick response* kepolisian sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (Prog.Harkamtibmas/Giat 3130);
 - b) pelayanan Kesehatan Polri (Prog.dukma/Giat 3072).
- c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Mewujudkan Penegakkan Hukum dan Pelayanan Penanganan Perkara yang Adil, Transparan, Legal, Humanis dan Setara”**, yaitu:
- 1) meningkatkan penanganan dan penyelesaian tindak pidana oleh penyidik guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (Prog.lidiksidik/Giat3140);
 - b) penyelenggaraan laboratorium forensik (Prog. lidiksidik/Giat 3141);
 - c) penindakan tindak pidana umum (Prog.lidiksidik/Giat 3142);
 - d) penindakan tindak pidana Narkoba (Prog.lidiksidik/Giat 3144);
 - e) penindakan tindak pidana ekonomi khusus (Prog.lidiksidik/Giat 3145);
 - f) penindakan tindak pidana korupsi (Prog.lidiksidik/Giat 3146);
 - g) penindakan tindak pidana Siber (Prog.lidiksidik/Giat 3151);
 - h) penindakan tindak pidana tertentu (Prog.lidiksidik/Giat 5083);
 - i) penyelenggaraan kepolisian perairan (Prog.lidiksidik/Giat 3134);
 - j) penindakan tindak pidana lalu lintas (Prog.lidiksidik/Giat 4343).
 - k) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (prog. Harkamtibmas/Giat 3130).
- 2) meningkatkan proses pengawasan penyidikan guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 pengawasan penyidikan (Prog.lidiksidik/Giat 5086)
- d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Mewujudkan Pengelolaan SDM yang Mandiri, Berintegritas dan Profesional”**, yaitu:
- 1) melanjutkan peningkatan kualitas 8 standar pendidikan erap*olice* 4.0;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 penyelenggaraan kurikulum pendidikan dan latihan Polri (Prog.SDM/Giat 5070);

2) menggunakan.....

- 2) menggunakan Bisnis Proses Polri dan Manajemen Resiko dalam pengembangan struktur organisasi Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri (Prog.dukma/Giat 5052)
- 3) meningkatkan kapabilitas SDMPolri yang unggul di era *Police* 4.0;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
pengendalian pegawai Polri (Prog.SDM/Giat 3107)
- 4) melanjutkan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pembinaan pendidikan dan latihan Polri (Prog.SDM/Giat 5069);
 - b) pengendalian pegawai Polri (Prog.SDM/Giat 3107).
- 5) meningkatkan pengelolaan SDM yang profesional dan humanis;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) manajemen anggaran (Prog.dukma/Giat 5054);
 - b) pembinaan karier personel Polri (Prog.dukma/Giat 3108);
 - c) penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri (Prog.SDM/Giat 3105).
- 6) melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
pembinaan karier personel Polri (Prog.SDM/Giat 3108);
- 7) meningkatkan keterampilan dan etika Yanlik serta kemampuan komunikasi digital;

untuk....

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri (Prog.SDM/Giat 3100).

- 8) meningkatkan kesejahteraan melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja bagi aparaturnya Polri;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pelayanan kesehatan (Prog.dukma/Giat 3072);
- b) pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri (Prog.modernisasialmatsus dan sarpras Polri/Giat 5062);
- c) penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri (Prog.SDM/Giat 3105).

- e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Mewujudkan Almatsus, Perbekalan dan Fasilitas Konstruksi Polri yang Modern dan Memadai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Berbasis *Minimum Essential Police Equipment (MEPE)*”**, yaitu:

- 1) memodernisasi serta memenuhi sarana dan prasarana serta Almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Polri (Prog.dukma/Giat 5067);

- 2) mendukung peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMN) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almatsus Alpalhankamdi lingkungan Polri;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pengkajian dan strategi Sarpras (Prog. modernisasialmatsus dan sarpras Polri/Giat 5060);
- b) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Polri (Prog. dukma/Giat 5067);
- 3) pemenuhan rumah dinas bagi pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas di wilayah perbatasan, destinasi wisata, Kawasan industri, dan PPKT;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri (Prog. modernisasialmatsus dan sarpras Polri/Giat 5062).
- 4) melanjutkan pengembangan laboratorium forensik di kewilayahan secara bertahap;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri (Prog. Modernisasi almatsus dan sarpras Polri/Giat 5062).
- 5) melanjutkan pengembangan Almatsus SCI;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
pengembangan peralatan Polri (Prog. Modernisasi almatsus dan sarpras Polri/Giat 3084);
- 6) melanjutkan pembangunan dan menyatukan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pengembangan peralatan Polri (Prog. Modernisasi almatsus dan sarpras Polri/Giat 3084);
 - b) teknologi komunikasi (Prog. dukma/Giat 5055).

7) mengoptimalkan.....

- 7) mengoptimalkan kampanye penggunaan hotline 110 dalam menerima dan merespon pengaduan/ pelaporan masyarakat;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
teknologi komunikasi (Prog.dukma/Giat 5055).
- f. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Mewujudkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian”**, yaitu:
 - 1) menguatkan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *Medsos/ WhatsApp*;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan (Prog.dukma/Giat 3091);
 - b) pengawasan penyidikan (Prog.lidiksidik/Giat 5086);
 - c) pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (Prog.dukma/Giat 5056);
 - 2) melanjutkan pelaksanaan kegiatan Saber Pungli (sapu bersih pungutan liar) di lingkungan internal Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan (Prog.dukma/Giat 3091).
 - 3) meningkatkan kegiatan pencegahan perilaku yang menyimpang (perilaku arogan dan tidak profesional) serta perbuatan korupsi di internal Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) penyelenggaraan pengamanan internat Polri (Prog. dukma/Giat 3089);
- b) pelayanan administrasi keuangan Polri (Prog. dukma/Giat 3068);
- 4) meningkatkan tata kelola manajemen kinerja perencanaan dan penganggaran Polri yang akuntabel berbasis manajemen risiko; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) penyusunan kebijakan Polri (Prog. dukma/Giat 5051);
 - b) manajemen anggaran (Prog. dukma/Giat 5054);
 - c) pelayanan administrasi keuangan Polri (Prog. dukma/Giat 3068);
 - d) *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran Polri (Prog. dukma/Giat 4339).
- 5) melanjutkan penataan kelembagaan dan tata laksana Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar efektif dan efisien sesuai dengan *Proses Bisnis* Polri; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri (Prog. dukma/Giat 5052).
- 6) meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - Reformasi Birokrasi Polri (Prog. dukma/Giat 5053).

2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang TIK Polda Kalbar Tahun 2025

Mengacu sasaran prioritas Polda Kalbar, maka sasaran prioritas Bidang TIK Polda Kalbar adalah sebagai berikut:

- a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Polri yang Semakin Inovatif”, yaitu:**
 - 1)** melaksanakan modernisasi fasilitas sarana dan prasarana pada sentra pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) dukungan manajemen dan tehnik sarpras (Prog.modernisasi almatsus dan sarpras Polri/Giat 5059);
 - b) penyelenggaraan teknologi informasi (Prog.dukma/Giat 3071).
 - c) Dukungan pelayanan internal perkantoran Polri (Prog.dukma/Giat 3073).

IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF BIDANG TIK POLDA KALBAR T.A. 2025

1. Program dan Kegiatan

a. Program Dukungan Manajemen

1) Tujuan:

Terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas; pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian; sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi serta kerja sama lintas sektor.

2) Kegiatan:

- a) penyelenggaraan teknologi informasi;
- b) dukungan pelayanan internal perkantoran Polda Kalbar.

b. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polda Kalbar

1) Tujuan:

Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi Almatsus dan saranaprasarana Polda Kalbar guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi bidang pembinaan dan operasional.

2) Kegiatan:

- a) dukungan manajemen dan teknis Sarpras.

2. Pagu indikatif Bidang TIK Polda Kalbar T.A. 2025

- a. Tahun Anggaran 2025 Bidang TIK Polda Kalbar melaksanakan 2 program, 3 kegiatan, dengan pagu Indikatif sebesar Rp. **7,566,758,000,-** (Tujuh milyar lima ratus enam puluhan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

b. Alokasi.....

b. Alokasi Anggaran Pagu Indikatif Bidang TIK Polda Kalbar T.A. 2025 sebagai berikut :

1) Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp. 6,596,198,000,-** meliputi Kegiatan dengan anggaran yaitu :

(a) Penyelenggaraan Teknologi Informasi

Layanan Data dan Informasi **Rp. 8,320,000,-**

(b) Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri: Rp 6,587,878,000,-

1. Pakrim	Rp.	2,830,000,-
2. Rakor/kerja/dinas/pimpinan Pokja/ konsultasi	Rp	36,480,000,-
3. Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan	Rp	2,100,000,-
4. ULP Non Organik / jaga fungsi	Rp.	102,200,000,-
5. Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp	3,740,389,000,-
6. Uang makan Lembur PNS	Rp	5,180,000,-
7. Uang Lembur PNS	Rp	8.340.000,-
8. Rakor/kerja/dinas/pimpinan Pokja/konsultasi		34,160,000,-
9. Biaya Telepon	Rp	294,257,000,-
a. Telepon Fisik	Rp.	9.365.000,-
b. Telepon Seluler	Rp.	274.392.000,-
c. SMS Broadcast	Rp.	10.500.000,-
10. Pengadaan Perlengkapan kantor (ATK)	Rp	63,927,000,-
11. Duk Ops Satker	Rp.	138,840,000,-

12. Jaldis Kegiatan Ke Mabes	Rp.	20,360,000,-
13. Jaldis giat ke Satker / Satwil jajaran	Rp.	13,520,000,-
14.Jaldis Binteknis ke Satwil Jajaran	Rp.	37,800,000,-
15. Jaldis yanduknis Bid TIK ke Satker / Satwil jajaran	Rp	40,160,000,-
16.Jaldis dalam rangka	Rp	27,000,000,-
17.Honorarium SAI/ SAKPA/ SIMAK/ SMAP/Pengelola keuangan	Rp.	57,000,000,-
18.Internet	Rp	2,115,695,000,-

- 2) **Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polrisebesar Rp. 970,560,000,-**(Sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)meliputi **kegiatan** yaitu :

(a) Dukungan manajemen dan Teknik Sarpras

- | | | |
|---|-----|---------------|
| 1. Jasa Kebersihan | Rp | 80,854,000,- |
| 2. Harwat <i>Command Center</i> dan CCTV Obvit | Rp | 163,205,000,- |
| a. Harwat <i>Command Center</i> | Rp | 54,610,000,- |
| b. Harwat CCTV Pam Mako dan Obvit | Rp | 108,595,000,- |
| 3. Harwat Jaringan Komunikasi Radio : | Rp | 441,684,000,- |
| a. Trunking | Rp | 217,284,000,- |
| b. Konvensional | Rp | 64,400,000,- |
| c. Tower SST | Rp | 160,000,000,- |
| 4. Pemeliharaan kendaraan bermotor Roda 4/6/10 | Rp. | 166,000,000,- |
| a. 2 (dua) Unit R6 | Rp. | 58,000,000,- |
| b. 4(empat) Unit R4 | Rp. | 108,000,000,- |
| 5. Harwat Jarkomdat dan Perangkat Vicon | Rp | 63,847,000,- |
| 6. Pemeliharaan kendaraan bermotor Roda 2 sebanyak 3 (tiga) unit. | Rp. | 10.500.000,- |
| 7. Pemeliharaan dan perawatan AC sebanyak 5(lima) unit. | Rp. | 3,050,000,- |
| 8. Pemeliharaan dan perawatan Komputer sebanyak 4 (empat) unit | Rp. | 3,000,000,- |
| 9. Pemeliharaan dan perawatan Printer sebanyak 3 (tiga) unit. | Rp. | 2,070,000,- |
| 10. Pemeliharaan dan perawatan laptop Sebanyak 9 (sembilan) unit | Rp | 8,100,000,- |
| 11. Pemeliharaan dan perawatan Note Book Sebanyak 4 (empat) unit | fRp | 2,600,000,- |

12. Honor Pokja Pemilihan	Rp.	1.800.000,-
13. Duk Jaldis Tim Klarifikasi dan pembuktian kualifikasi penyedia	Rp	23,850,000,-
Total Keseluruhan	Rp7,566,758,000,-	

Sumber pendanaan Pagu Ideal Bidang TIK Polda Kalbar Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp7,566,758,000,-** rinciannya adalah sebagai berikut :

a. bersumber dari Rupiah Murni	Rp. 7.566.758.000,-
b. bersumber dari PNB	Rp. -
c. bersumber dari Badan Layanan Umum	Rp. -

V. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat T.A. 2025 ini disusun sebagai bahan masukan dalam rangka menentukan program dan kegiatan lebih lanjut.



Pontianak, Juli 2024

KEPALA BIDANG TIK POLDA KALBAR


ZULHIR DESTRIAN, S.I.K, M.H.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76120891